



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 51 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN SELATAN TAHUN 2023**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023, disusun berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;

- g. terukur;
 - h. berkeadilan;
 - i. berwawasan lingkungan; dan
 - j. berkelanjutan.
- (2) Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai :
- a. bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023.

BAB III PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran RPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada :
- a. RKP Tahun 2023;
 - b. program strategi nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah,;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun oleh Bappeda.
- (2) Dalam menyusun RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

BAB IV
SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 5

- (1) Sistimatika penyusunan RKPD Tahun 2023 terdiri atas :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
 - h. DAFTAR TABEL
 - i. DAFTAR GAMBAR
 - j. DAFTAR GRAFIK

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 7 Juli 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 51 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 JULI 2022

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023**

**A. DAFTAR SUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023**

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-88
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-97
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
	4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-8
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2021	V-5
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
	6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	6.1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

B. DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Buton Selatan Berdasarkan Analisa GIS Tahun 2022
Tabel	2.2	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.3	Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.4	PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.5	Distribusi PDRB Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2021

Tabel	2.6	Perkembangan Indikator Penyusunan IPM Tahun 2017-2021
Tabel	2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.8	Angka Putus Sekolah Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.9	Kualitas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.10	Prevalensi Stunting di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.11	Sarana Olahraga Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.12	Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.13	Rasio sekolah dan murid di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.14	Rasio kelas dan guru di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.15	Indikator Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.16	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.17	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.18	Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.19	Indikator Pelayanan Urusan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.20	Persentase Kondisi Sanitasi dan Air Bersih di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.21	Kondisi Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan Di Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.22	Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Selatan Tahun
Tabel	2.23	Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021
Tabel	2.24	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh yang Sudah Tertangani di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021
Tabel	2.25	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kecamatan
Tabel	2.26	Capaian Urusan Sosial Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Tabel	2.27	Angka Kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2021
Tabel	2.28	Capaian Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.29	Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Kerja Tahun 2021
Tabel	2.30	Data Perkembangan UMKM Kabuapten Buton Selatan Tahun 2017-2019
Tabel	2.31	Sebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021
Tabel	2.32	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan

Tabel	2.33	Capaian Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	2.34	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.35	Kondisi Penanganan Sampah di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.36	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.37	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.38	Capaian Indikator Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.39	Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.40	Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.41	Jumlah Pasar Menurut Jenisnya dan Wilayah Kecamatan Tahun 2021
Tabel	2.42	Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri dan Kecamatan Tahun 2021
Tabel	2.43	Banyaknya Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan tahun 2021
Tabel	2.44	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	2.45	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Tabel	2.46	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2020
Tabel	2.47	Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.48	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.49	Luas Fungsi Hutan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.50	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN menurut Rayon Tahun 2021
Tabel	2.51	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.52	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan (Km) di Kab. Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.53	Jumlah Pelanggan Air yang disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Tabel	2.54	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon
Tabel	2.55	Rasio Ketergantungan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021

Tabel	2.56	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tabel	2.57	Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Buton Selatan
Tabel	3.1	PDRB Perkapita Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Tabel	3.2	Distribusi PDRB Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2021
Tabel	3.3	Target Indikator Makro Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023
Tabel	3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023
Tabel	3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023
Tabel	3.7	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 s.d. Tahun 2023
Tabel	4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Pada Tahun 2023
Tabel	4.2	Keterkaitan isu strategis, sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023
Tabel	4.3	Keterkaitan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan Serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023
Tabel	6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten
Gambar	1.2	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Gambar	2.1	Peta Wilayah Adminstrasi Kabupaten Buton Selatan
Gambar	2.2	Rata-rata Suhu Udara Menurut Bulan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Gambar	2.3	Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Selatan
Gambar	2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
Gambar	2.5	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Gambar	2.6	Grafik Indeks Gini Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Gambar	2.7	Grafik IPM Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
Gambar	2.8	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
Gambar	2.9	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021

- Gambar 2.10 Grafik Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021
- Gambar 2.11 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
- Gambar 2.12 Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
- Gambar 2.13 Grafik Panjang Jalan dan Kondisi Jalan (Km) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
- Gambar 2.14 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Buton Selatan
- Gambar 2.15 Grafik Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Buton Selatan
- Gambar 2.16 Grafik Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021
- Gambar 2.17 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Selatan Tahun 2018-2021
- Gambar 2.18 Grafik Wisatawan Yang Berkunjung di Kabupaten Buton Selatan
- Gambar 2.19 Capaian kinerja indeks gini Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 2.20 Capaian Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 2.21 Capaian kinerja pembangunan indeks reformasi birokrasi Tahun 2020
- Gambar 2.22 Capaian RPJMD Perubahan Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 2.23 Capaian kinerja pembangunan kemiskinan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2021
- Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

